

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP PENILAIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Malang)**

Evi Lamasari*, Dwiyani Sudaryanti, dan Abdul Wahid Mahsuni*****

Email : lamitasarievi@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of performance-based budgeting, regional financial accounting systems, and regional financial management information systems on the assessment of regional work units. This research is a kind of quantitative approach. The analytical method used is quantitative data analysis using SPSS. The sampling technique used in this study was purposive sampling.

The results of this study indicate that partially there is a significant effect of performance-based budgeting, regional financial accounting systems, and regional financial management information systems on the assessment of regional work units.

Keywords: *Performance-Based Budgeting, Regional Financial Accounting System, Regional Financial Management Information System and Assessment of Regional Apparatus Work Units*

Pendahuluan

Latar Belakang

Masyarakat menuntut pemerintahan memberikan kinerja dengan baik dan optimal untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kinerja menjadi gambaran mengenai pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan visi dan misi suatu organisasi. Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintahan daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja akan tercermin pada laporan pertanggung jawaban pada bentuk laporan prestasi atau kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal (Sem, 2012).

Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah (APBD) ialah amanat rakyat pada pemda buat mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada satu tahun finansial tertentu yang dinyatakan dalam mata uang. Perwujudan amanat masyarakat pada sisi pemerintahan daerah ini dinyatakan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintahan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, dengan demikian penyusunan anggaran pemerintah daerah wajib berorientasi pada kepentingan masyarakat public (Indra Bastian, 2006)

Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah perihal pengelolaan keuangan daerah (PP No. 58 Tahun 2005). Pada struktur pemda, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Sistem akuntansi disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Seiring dengan penetapan pemerintahan No. 24 tahun 2005 perihal Standar Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal atau dikenal juga dengan sebutan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) adalah sistem yang terdiri dari bermacam-macam program penyusunan/penganggaran APBD, Penatausahaan Keuangan, Akuntansi serta Penyusunan Laporan Keuangan. Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan

Pemerintahan No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Pemendagri No. 59 Tahun 2007 No. perihal Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ini mengambil judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya ialah sebagai berikut.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk referensi dalam menganalisis mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah secara umum.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tinjauan Pustaka

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja ialah sistem penganggaran yang berorientasi di output organisasi serta berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi serta planning strategi organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumberdaya di program bukan di unit organisasi semata serta menggunakan hasil measurement menjadi indicator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

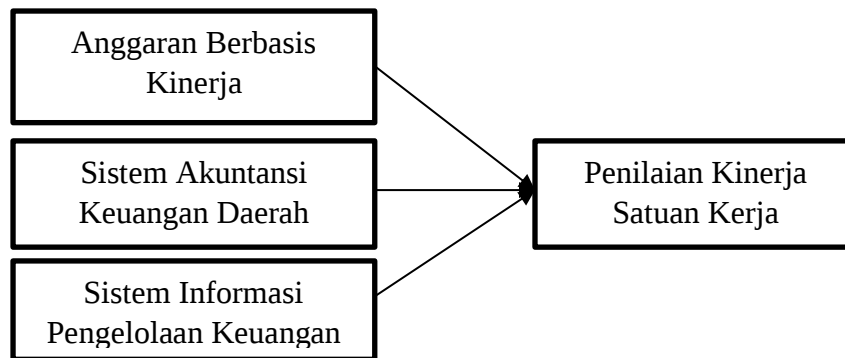
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian Akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh Accounting Principle Board (APB) yang memandang akuntansi asal sudut kegunaannya sebagai berikut: berdasarkan Halim (2002:138) “akuntansi ialah sebuah aktivitas jasa. Manfaatnya merupakan menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar bermanfaat pada pengambilan keputusan ekonomi dalam membentuk pilihan-pilihan yang akal pada antara aneka macam cara lain tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, diantaranya akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem didefinisikan Mulyono (2009) Sistem ialah suatu kerangka kerja terpadu yang memiliki satu target atau lebih, sedangkan menurut McLoad dan Achell (2001) Sistem merupakan sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi menggunakan maksud yang sama buat mencapai suatu tujuan. Informasi berdasarkan Wilkinson (1992) adalah komoditas penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan, yang terdiri dari data yang sudah ditransformasikan dan didesain lebih bernilai melalui pemrosesan.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dalam peneliti ini dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H1 : Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H3 : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Metode Penelitian

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian yang digunakan seluruh pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Kota Malang. Kriteria penentuan sampel ini yaitu seluruh Pegawai SKPD pemerintah kota Malang dan Pegawai yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di BKAD

Operasional Variabel

Penilaian Kinerja SKPD

Penilaian kinerja SKPD merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang di amanahkan. Variabel ini dapat diukur berdasarkan persepsi responden tentang pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola keuangan daerah SKPD yang bersangkutan dilihat dari segi ekonomis, efisien serta efektif.

Anggaran berbasis kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu anggaran yang berpegang erat terhadap visi misi dan perencanaan strategi suatu organisasi untuk menjadi alat ukur pencapaian dan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan prosedur dari pencatatan, pengumpulan data sampai pelaporan keuangan yang dilakukan menggunakan aplikasi atau secara manual. Sistem akuntansi keuangan daerah diukur menggunakan indicator sebagai berikut:

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan adalah sistem yang berhubungan tentang pengelolaan keuangan yang dapat menghasilkan laporan keuangan. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji Validitas adalah berguna untuk melihat valid tidaknya setiap instrument. Berikut ini adalah hasil uji validitas terhadap variabel Anggaran berbasis kinerja (X1), Sistem akuntansi keuangan daerah (X2), Sistem informasi pengelolaan keuangan (X3) dan Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y).

Variabel	Item	R Hitung	r tabel	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	X1.1	0,718	0,333	Valid
	X1.2	0,651	0,333	Valid
	X1.3	0,488	0,333	Valid
	X1.4	0,829	0,333	Valid
	X1.5	0,794	0,333	Valid
	X1.6	0,670	0,333	Valid
Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2)	X2.1	0,625	0,333	Valid
	X2.2	0,769	0,333	Valid
	X2.3	0,841	0,333	Valid
	X2.4	0,866	0,333	Valid
	X2.5	0,642	0,333	Valid
	X2.6	0,672	0,333	Valid
	X2.7	0,769	0,333	Valid
	X2.8	0,841	0,333	Valid
	X2.9	0,841	0,333	Valid
	X2.10	0,866	0,333	Valid
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	X3.1	0,841	0,333	Valid
	X3.2	0,861	0,333	Valid
	X3.3	0,682	0,333	Valid
	X3.4	0,655	0,333	Valid
	X3.5	0,762	0,333	Valid
	X3.6	0,841	0,333	Valid
Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)	Y1.1	0,657	0,333	Valid
	Y1.2	0,751	0,333	Valid
	Y1.3	0,903	0,333	Valid
	Y1.4	0,903	0,333	Valid
	Y1.5	0,824	0,333	Valid

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa semua indikator pada variabel Anggaran berbasis kinerja (X1), Sistem akuntansi keuangan daerah (X2), Sistem informasi pengelolaan keuangan (X3) dan Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas memakai teknik one shoot melalui uji statistic croncbach alpha. Dikatakan lolos uji reabilitas bila nilai croncbach alpha $>0,70$ dan bila $<0,70$ maka dinyatakan tidak reliable (Ghozali, 2016 : 47)

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)	0,869	Reliabel
2	Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	0,813	Reliabel
3	Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,925	Reliabel
4	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	0,865	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel penelitian dinyatakan reliabel. Pengujian instrumen penelitian sudah menghasilkan kesimpulan layak sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,30971468
	Absolute	,119
Most Extreme Differences	Positive	,091
	Negative	-,119
Kolmogorov-Smirnov Z		,705
Asymp. Sig. (2-tailed)		,703

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada Tabel diketahui bahwa nilai *Asymp.sig* = 0,703 lebih besar dari taraf nyata 5% sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi Normal.

Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	0.852	1,174	Bebas Multikolinearitas
Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0.895	1,114	Bebas Multikolinearitas
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (X3)	0.784	1,276	Bebas Multikolinearitas

Hasil pengujian tersebut memberikan kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala (masalah) multikolinearitas, karena nilai *varian Inflation Factor* (VIF) adalah dibawah batas kriteria tentang adanya masalah multikolinearitas, yaitu 10 serta nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian, disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi korelasi atau hubungan linier (asumsi multikolinieritas terpenuhi).

Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	A	Keputusan
1	Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	0,745	0,05	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
2	Sistem akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,694	0,05	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
3	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (X3)	0,977	0,05	Tidak Terjadi heteroskedastisitas

Dari hasil uji Glejser diperoleh nilai sig pada variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1) = 0,745, Sistem akuntansi Keuangan daerah (X2) = 0,694, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (X3) = 0,977, Semua variabel memiliki nilai sig > 0,05 yang menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Hipotesis

$$Y = 7,425 + 0,166X_1 + 0,084X_2 + 0,607X_3 + e$$

1. a = Nilai Konstanta sebesar 7,425, artinya bila variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1), Sistem akuntansi Keuangan daerah (X2), dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (X3) bernilai konstan, maka Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) akan bernilai positif.
2. b1 = Koefisien regresi variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dengan nilai 0,166 (positif), dijelaskan bahwa apabila *variable* penelitian Anggaran Berbasis Kinerja meningkat, maka variabel Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah meningkat, dengan asumsi variabel X2, X3, konstan.
3. b2 = Koefisien regresi penelitian variabel Sistem akuntansi Keuangan daerah (X2) dengan 0,084, dijelaskan bahwa apabila variabel penelitian Sistem akuntansi Keuangan daerah

meningkat, maka Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah meningkat dengan asumsi variabel X1, X3, konstan.

4. b_3 = Koefisien regresi variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (X3) dengan nilai 0,607, dijelaskan bahwa apabila variabel penelitian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan meningkat, maka variabel Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah meningkat, dengan asumsi variabel X1, X2, konstan.

Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	51,718	3	17,239	4,648	,001 ^b
Residual	114,968	31	3,709		
Total	166,686	34			

Dari tabel diatas hasil uji nilai F dapat diketahui nilai signifikan sebesar $0.001 < 0,05$. Dengan demikian berdasarkan hipotesis (H_1) yang diajukan dalam penelitian, Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1), Sistem akuntansi Keuangan daerah (X2), dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah meningkat (Y).

Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,425	6,665		1,114	,774
Anggaran Berbasis Kinerja	,166	,241	,111	,687	,007
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,084	,200	-,067	,422	,010
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	,607	,196	,521	3,093	,004

Sumber data primer diolah 2022

1. Anggaran Berbasis Kinerja (X1)

Pada variabel anggaran berbasis kinerja diketahui memiliki nilai t 0,687 dengan signifikan $0,007 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)

Pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diketahui memiliki nilai t 0,422 dengan nilai signifikan $0,010 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)

Pada variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui memiliki nilai t 3,093 dengan nilai signifikan $0,004 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,857 ^a	,780	,744	1,926

Berdasarkan tabel 4.15 diatas diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,744 atau sebesar 74.4% hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan dari Variabel Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem akuntansi Keuangan daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah. sebesar 74.4% dan 25,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini.

Implikasi Hasil Penelitian

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem akuntansi Keuangan daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hasil perhitungan yang telah didapat untuk Variabel Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah diuji secara Simultan F menghasilkan nilai signifikan sebesar $0.001 < 0,05$. Dengan hasil ini maka dapat dinyatakan bahwa Variabel Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem akuntansi Keuangan daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan berpengaruh secara Simultan pada Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendy Septyanto (2016) menyatakan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Penilaian Kerja Satuan Daerah.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan dari hasil uji t secara parsial diketahui bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap variabel Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah menyatakan adanya pengaruh yang positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendy Septyanto (2016), yang mana hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penilaian Kerja Satuan Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penilaian Kerja Satuan Daerah.

Pengaruh Sistem akuntansi Keuangan daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan dari hasil uji t secara parsial diketahui bahwa variabel Sistem akuntansi Keuangan daerah berpengaruh terhadap variabel Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah menyatakan adanya pengaruh yang positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu dkk (2020), yang mana hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada kantor dinas pemerintahan Kabupaten Bandung. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada kantor dinas pemerintahan Kabupaten Bandung.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan dari hasil uji t secara parsial diketahui bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan berpengaruh terhadap variabel Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah menyatakan adanya pengaruh yang positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septyanto (2016), yang mana hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penilaian Kerja Satuan Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penilaian Kerja Satuan Kerja di Surakarta.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji F.

Keterbatasan

- Peneliti dalam mendapatkan data responden tidak dapat bertemu secara langsung karena penelitian tidak diperbolehkan mengganggu jam kerja pegawai.
- Dalam penelitian ini data yang dihasilkan dari instrument kuisioner yang didasarkan dari jawaban responden, sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrument kuisioner tanpa dilengkapi dengan wawancara.

Saran

- Bagi peneliti berikutnya hendaknya menambah variabel-variabel lain yang bisa berpengaruh pada Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Peneliti selanjutnya dapat menambah dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang ada

Daftar Pustaka

- Septyanto, H., & Mujiyati, M. (2015). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kertiani, N. M., Kusumawati, N. P. A., & Ayu, P. C. (2020). PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 204-222.
- Wongkar, D. L., Senduk, V., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 1-7.
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2).
- Annisa, V., Darlis, E., & Al Azhar, A. (2017). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyono, 2009, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: ArRuzz Media.

*) **Evi Lमितasari** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Dwiyani Sudaryanti adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **Abdul Wahid Mahsumi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang